

Dari Minoritas ke Mayoritas: Asimilasi dan Integrasi Orang Indo-Eropa di Indonesia, 1950-1959

Max Rooyackers

Master Program of History, Leiden University, Belanda

Corresponding address: maxrooyackers@outlook.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i1.54248>

Diterima/Received: 15 Mei 2023; Direvisi/Revised: 2 July 2024; Disetujui/Accepted: 21 July 2024

Abstract

This study investigates the integration and assimilation trajectories of Indonesian citizens of European descent in the aftermath of the national revolution. Focusing on the Partai Indo Nasional (PIN) and the Indo-Eenheids Verbond (IEV), later transformed into the Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia (GIKI-IEV), the research explores the divergent strategies adopted by these two prominent organizations to navigate their post-colonial identity. While both groups sought integration into Indonesian society, their approaches varied significantly. PIN prioritized legal assimilation without imposing cultural uniformity, whereas GIKI-IEV emphasized social work and education as avenues for both integration and cultural adaptation. Despite facing numerous internal and external challenges, the assimilation process accelerated after 1959, coinciding with the dissolution of both organizations. Their contrasting perspectives on national culture and integration fostered internal divisions and influenced the broader contours of Indo-European assimilation in Indonesia.

Keywords: Indo-Europeans; Persatuan Indonesia Nasional; Indo Eenheids Verbond; Assimilation.

Abstrak

Kajian ini mengkaji proses integrasi dan asimilasi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Eropa pasca-revolusi. Berfokus pada Partai Indo Nasional (PIN) dan *Indo-Eenheids Verbond* (IEV), yang kemudian berubah menjadi Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia (GIKI-IEV), penelitian ini menelusuri strategi berbeda yang diadopsi oleh kedua organisasi terkemuka ini dalam mengarahkan posisi mereka pada identitas kolonial. Meskipun kedua kelompok berupaya berintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia, pendekatan yang digunakan sangat bervariasi. PIN memprioritaskan asimilasi hukum tanpa memaksakan keseragaman budaya, sedangkan GIKI-IEV menekankan pekerjaan sosial dan pendidikan sebagai jalan bagi integrasi dan adaptasi budaya. Meskipun menghadapi banyak tantangan internal dan eksternal, proses asimilasi semakin cepat setelah tahun 1959, bertepatan dengan pembubaran kedua organisasi tersebut. Perspektif mereka yang berbeda mengenai budaya nasional dan integrasi mendorong perpecahan internal dan mempengaruhi kontur asimilasi Indo-Eropa yang lebih luas di Indonesia.

Kata Kunci: Indo-Eropa; Persatuan Indonesia Nasional; *Indo Eenheids Verbond*; Asimilasi.

Pendahuluan

Kedudukan orang Indo-Eropa di Hindia Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia sudah menjadi isu yang ramai dibicarakan dan kontroversial. Di Indische Partij, orang Indo-Eropa dan bumiputra mampu bersatu menggagas dan memperjuangkan impian sebuah bangsa merdeka, sebelum dibubarkan pada tahun 1913. Indische Partij memiliki gagasan tentang bangsa merdeka yang tidak terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara semua warga negara, tanpa memandang asal

etnisnya. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, setelah pembubaran *Nationaal Indische Partij* atau Sarekat Hindia, pandangan ini telah jauh berubah. Terutama Indo-Europeesch Verbond (IEV) dan organisasi nasionalis bertanggung jawab atas terbentuknya mentalitas “sana” dan “sini”. Orang Indo-Eropa dianggap sebagai pendukung keras Belanda dan oleh karena itu tidak dapat diajak bekerja sama. Mereka yang di “sana” jadi tidak dapat bergabung dengan kami di “sini”, yaitu para pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini berakibat, antara lain, orang Indo-

Eropa dilarang untuk bergabung di partai nasionalis hingga tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda (Rooyackers 2023).

Baru pada akhir tahun 1930-an kedua pihak mulai saling mendekati, namun proses itu terputus dengan meletusnya perang dunia. Waktu penjajahan Jepang, isu kedudukan orang Indo-Eropa dalam masyarakat tetap sensitif. Berbagai gerakan nasionalis didirikan oleh orang Indo-Eropa dan pemerintah Jepang untuk menyatukan kelompok Indo-Eropa dan bumiputra pada masa itu. Tetapi karena kerasnya propaganda Jepang yang mengecap orang Indo-Eropa sebagai pendukung penjajah Belanda dengan tokoh pergerakan Indo-Eropa pro-Jepang seperti P.F. Dahler yang tidak populer, usaha ini gagal. Sebaliknya, orang Indo-Eropa sendiri semakin pro-Belanda karena kekejaman Jepang (Bouwsma 1995).

Pada masa revolusi muncul pandangan berbeda dari aliran orang Indo-Eropa nasionalis untuk pertama kali. Pada masa-masa sebelumnya, selalu terdapat kesatuan yang relatif besar di gerakan nasionalis Indo-Eropa karena jumlah anggota sedikit (Rooyackers 2023). Dua aliran utama pada akhirnya muncul. Pertama, aliran yang berada langsung di bawah pemerintah Indonesia, yaitu kubu Badan Oeroesan Peranakan Republik Indonesia (BOPRI) dengan tokoh garis keras lama seperti E.F.E. Douwes Dekker dan P.F. Dahler. Mereka ingin memaksakan asimilasi total yang secepat mungkin bagi orang Indo-Eropa, termasuk melalui *fashion*, agama, bahasa, serta aspek budaya lain yang mereka menganggap khas budaya 'Indonesia'. Douwes Dekker dan Dahler mencontohkan caranya dengan mengambil nama Indonesia (Danoerdja Setiaboeddhi dan Amir Dahlan), menggunakan Bahasa Indonesia, dan memeluk agama Islam (Rooyackers 2022).

Mereka menjadi oposisi dari organisasi nasionalis Indo-Eropa, Indonesia Merdeka (IM). Gerakan baru ini, yang didukung oleh sekitar tiga ribu anggota, mengusung gagasan integrasi bertahap melalui asimilasi. IM berpandangan bahwa penggunaan Bahasa Belanda dan keyakinan Kristen adalah bagian integral dari identitas budaya orang Indo-Eropa, yang pada gilirannya dianggap sebagai salah satu suku bangsa Indonesia. Namun, IM harus dibubarkan beberapa tahun kemudian

akibat tindakan Douwes Dekker yang memanfaatkan pengaruhnya di pemerintahan untuk menangkap para pemimpin IM. BOPRI pun tak lama kemudian mengalami nasib serupa menyusul meninggalnya tokoh-tokoh utamanya. Dengan demikian, ketika perang revolusi berakhir, diskursus mengenai asimilasi dan integrasi kembali ke titik awal, dihadapkan pada munculnya generasi baru pemimpin komunitas Indo-Eropa.

Penelitian mengenai asimilasi kelompok minoritas di Indonesia, khususnya orang Indo-Eropa, pada masa awal kemerdekaan masih sangat terbatas. Sebagian besar studi lebih fokus pada fenomena eksodus besar-besaran orang Indo-Eropa berpaspor Belanda pada awal 1950-an (Meijer, 2004; Indisch Herinneringscentrum, 2023). Meskipun demikian, beberapa penelitian telah mencoba mengisi kekosongan ini. Disertasi R.L. Hewett (2016), misalnya, memberikan gambaran komprehensif tentang komunitas peranakan Indo-Eropa. Namun, fokus penelitian ini lebih pada masa Orde Baru dan Reformasi, sehingga periode kritis pasca-kemerdekaan, terutama tahun 1950-1959, kurang tergarap secara mendalam. Selain itu, perspektif penelitian Hewett lebih berorientasi pada kebijakan pemerintah, sementara pengalaman dan pandangan orang Indo-Eropa sendiri kurang mendapat perhatian.

Karya-karya Van der Veur dan Van der Kroef pada dekade 1950-an dan 1960-an juga memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan yang dihadapi orang Indo-Eropa di Indonesia pasca-kemerdekaan. Meskipun demikian, analisis mereka terhadap proses asimilasi dan integrasi masih bersifat terbatas. Kedua penulis lebih cenderung mendeskripsikan fenomena secara umum, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap dinamika internal komunitas Indo-Eropa dan interaksi mereka dengan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini diawali dengan mengkaji latar belakang historis dan faktor-faktor yang membentuk diskursus integrasi dan asimilasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Eropa. Selanjutnya, penelitian ini akan mengulas secara mendalam dua organisasi utama komunitas Indo-Eropa, yang memiliki peran sentral dalam membentuk pandangan mengenai asimilasi. Melalui analisis komparatif terhadap kedua

organisasi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perbedaan konseptual mengenai asimilasi yang mereka usung serta implikasinya terhadap dinamika internal komunitas Indo-Eropa.

Metode

Penelitian ini berdasar pada metode penelitian sejarah Prof. Dr. Kuntowijoyo (2005). Proses penelitian ini terdiri dari lima langkah, yaitu pemilihan tema, pengumpulan sumber, heuristik, penafsiran sumber dan penulisan. Pemilihan tema dibuat berdasarkan minat dan kedekatan emosional penulis dengan topik ini serta ketersediaannya sumber primer. Tahap pengumpulan sumber terdiri atastiga jenis utama. Pertama, surat kabar berbahasa Belanda yang terbit masa 1950-1957 di Indonesia yang diakses melalui arsip digital Delpher. Kedua adalah buku dan artikel bersifat sumber primer atau sekunder yang ditulis tentang orang Indo-Eropa tentang pergerakan peranakan pasca kemerdekaan Indonesia. Ketiga adalah sumber sekunder dan tertier yang ditulis pada masa modern. Hasil pembacaan sumber-sumber tersebut digunakan untuk verifikasi kebenaran sumber, yang kemudian digunakan untuk melakukan penafsiran atas apa saja yang dibaca dalam sumber. Akhirnya terlaksana tahap terakhir penulisan berupa hasil penelitian ini.

Faktor Asimilasi dan Integrasi Tahun 1950-an

Setelah kemerdekaan Indonesia, pergerakan orang Indo-Eropa yang memilih kewarganegaraan Indonesia didominasi oleh dua organisasi utama. Pertama, Partai Indo Nasional (PIN) yang sebelumnya dikenal sebagai Partai Indo. Kedua, Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia - *Indo-Eenheids Verbond* (GIKI-IEV), yang merupakan transformasi dari organisasi kolonial Indo-Europeesch Verbond. Meskipun tujuan utama kedua organisasi ini sama, yakni mengintegrasikan orang Indo-Eropa ke dalam masyarakat Indonesia, namun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan strategi yang mereka usung.

Pada periode awal, yakni antara Desember 1949 hingga Desember 1951, fokus utama kedua organisasi adalah mendorong orang Indo-Eropa

memilih kewarganegaraan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari kampanye melalui siaran radio dan pamflet hingga pertemuan-pertemuan lintas komunitas. Namun, periode ini juga diwarnai oleh konflik internal yang cukup intens, sehingga menyulitkan upaya konsolidasi gerakan.

Baru pada periode 1953-1954, kedua organisasi berhasil mencapai konsensus dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sayangnya, persatuan ini bersifat sementara. Setelah pemilihan umum yang pertama, konflik internal kembali muncul, menandai babak baru dalam dinamika pergerakan nasionalis Indo-Eropa.

Perdebatan mengenai konsep budaya nasional Indonesia pada era 1950-an turut memengaruhi pemikiran PIN dan GIKI-IEV terkait asimilasi dan integrasi. Berbagai pandangan muncul, mulai dari gagasan Mohammad Hatta yang menekankan pada sintesis antara budaya lokal dan nasional (Feith & Castles, 1970), hingga pandangan yang lebih homogen seperti yang diusung oleh Soekarno. Pandangan yang terakhir ini semakin menguat setelah pemilihan umum pertama, seiring dengan bergulirnya masa Demokrasi Terpimpin (van der Kroef, 1958).

Dalam konteks ini, keberadaan orang Indo-Eropa menjadi sorotan. Meskipun Hatta memberikan ruang bagi keberadaan "suku Indo-Eropa" dalam bingkai Indonesia, namun ia tetap kritis terhadap pengaruh budaya asing. Sentimen anti-asing yang kuat di kalangan nasionalis Indonesia membuat orang Indo-Eropa seringkali dicurigai dan dianggap sebagai kelompok yang terlalu terpengaruh oleh budaya asing. Penggunaan istilah seperti "WNI asli" dan "WNI tidak asli" dalam media massa semakin memperkuat stigma negatif terhadap orang Indo-Eropa dan kelompok minoritas lainnya.

Selain perkembangan pemikiran yang berpengaruh dalam menggagas asimilasi oleh orang Indo-Eropa, perkembangan politik yang sensitif antara Indonesia dan Belanda juga turut mendorong proses ini. Hubungan kedua negara diwarnai oleh saling tuduh dan propaganda, di mana masing-masing pihak seringkali dijadikan kambing hitam atas berbagai peristiwa.

Salah satu contohnya adalah upaya kudeta APRA oleh Westerling pada tahun 1950, yang melibatkan sejumlah mantan anggota KNIL. Mengingat orang Indo-Eropa yang banyak terlibat dalam pasukan Westerling, kecurigaan terhadap seluruh komunitas Indo-Eropa pun meningkat (Meijer, 2004). Peristiwa lain yang memperkeruh suasana adalah kasus Jungschläger-Schmidt pada tahun 1954-1955, di mana puluhan warga negara Belanda dan Indo-Eropa ditangkap atas tuduhan terlibat dalam gerakan gerilya dan bekerja sama dengan Darul Islam (Goran, 1957). Meskipun hanya satu orang yang divonis bersalah, citra negatif Belanda sebagai pendukung Darul Islam semakin menguat.

Konflik Irian Barat juga menjadi pemicu ketegangan yang signifikan. Jelang dan pasca pemilihan umum, sentimen anti-Belanda semakin meningkat, mendorong Belanda untuk benar-benar meninggalkan Asia Tenggara.

Dalam berbagai peristiwa tersebut, orang Indo-Eropa nasionalis turut terdampak. Meskipun Belanda dijadikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, namun karena penampilan fisik dan gaya hidup mereka yang dianggap "Belanda", orang Indo-Eropa seringkali menjadi sasaran kecurigaan dan diskriminasi, terlepas dari kewarganegaraan atau ideologi yang mereka anut.

Akibatnya, masyarakat menjadi curiga terhadap seluruh orang Indo-Eropa, bahkan mereka yang telah menyatakan diri sebagai nasionalis. Terdapat perbedaan yang jelas antara mereka yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak masa revolusi, dianggap sebagai 'sobat seperjuangan', dan mereka yang memilih menjadi WNI setelah revolusi berakhir. Kelompok terakhir seringkali dicap sebagai oportunist yang hanya mencari keuntungan materi (van der Veur, 1954).

Ingatan kolektif tentang masa revolusi dan stigma negatif yang melekat pada orang Indo-Eropa akibat hubungan mereka dengan Belanda telah memicu diskriminasi yang meluas. Mereka seringkali dibedakan dari "orang Indonesia asli" dengan berbagai sebutan, seperti "golongan kecil turunan Eropa" atau "warga negara tidak asli". Diskriminasi ini merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Orang Indo-Eropa mengalami kesulitan dalam

mendapatkan pekerjaan, masuk sekolah, dan bahkan membeli rumah. Akibatnya, kemiskinan menjadi masalah serius di awal tahun 1950-an. Meskipun demikian, organisasi seperti GIKI-IEV berhasil memberikan bantuan di beberapa kota besar.

Dilema ini membuat banyak orang Indo-Eropa ragu untuk memilih antara identitas Indonesia dan Belanda. Ketidakpastian ini juga menghambat interaksi sosial mereka dengan masyarakat Indonesia, sehingga proses integrasi menjadi terhambat (Jacobsen, 2018). Merasa tidak sepenuhnya diterima di kedua belah pihak, banyak yang menunda pengambilan keputusan mengenai kewarganegaraan hingga batas akhir.

Situasi politik yang tidak stabil, seperti penghapusan sistem federasi dan berbagai pemberontakan, semakin memperparah polarisasi dan menghambat proses integrasi orang Indo-Eropa. Belanda kerap dijadikan kambing hitam atas berbagai permasalahan, sehingga orang Indo-Eropa pun semakin dicurigai terlibat dalam gerakan-gerakan separatis. Tahun 1953, situasi semakin memanas dengan maraknya perburuan terhadap orang Belanda dan Indo-Eropa (Jacobsen, 2018). Diskriminasi di berbagai bidang, seperti ekonomi, perumahan, dan kehidupan sehari-hari, semakin intensif.

Awalnya, orang Indo-Eropa menyambut baik sistem federasi karena mereka berharap kelompok minoritas seperti mereka akan mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Namun, harapan tersebut pupus seiring dengan semakin kuatnya sentimen anti-Belanda. Secara ekonomi, mereka merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua. Kasus penyitaan rumah dan pengusiran warga semakin memperburuk kondisi mereka (van der Veur, 1960). Meskipun secara hukum memiliki hak yang sama, dalam praktiknya, diskriminasi masih terjadi. Permasalahan kepemilikan tanah, yang masih mengacu pada hukum kolonial, juga semakin mempersulit kehidupan orang Indo-Eropa. Mereka dilarang membeli tanah, sehingga pilihan mereka semakin terbatas.

Kondisi ini mendorong sebagian orang Indo-Eropa untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan baru di luar negeri. Sebagian lainnya memilih untuk lebih aktif dalam organisasi

seperti PIN dan GIKI-IEV. Namun, kepergian para pemimpin organisasi semakin menguatkan keraguan mereka yang bertahan di Indonesia.

Dalam upaya asimilasi dan integrasi, pergerakan Indo-Eropa seringkali terjebak dalam dilema. Di satu sisi, organisasi seperti GIKI-IEV berusaha menyesuaikan diri dengan pandangan mayoritas masyarakat dengan menggunakan istilah-istilah seperti "Orang Indonesia asli". Namun, penggunaan istilah ini justru memperkuat stigma negatif terhadap orang Indo-Eropa dan menegaskan perbedaan mereka.

PIN mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka berupaya mengubah diskursus publik dengan mengusulkan perubahan terminologi dalam undang-undang. Snel, salah satu tokoh PIN, mengusulkan penggunaan istilah "warga negara" dan "bukan warga negara" untuk menggantikan istilah yang berkonotasi negatif seperti "warga negara tidak asli". Snel menegaskan bahwa secara hukum tidak ada perbedaan antara warga negara, namun dalam praktiknya, diskriminasi masih terjadi (*Algemeen Indisch Dagblad*, 1954).

PIN dan Snel aktif menyuarakan diskriminasi yang dialami orang Indo-Eropa dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara. Mereka sering melaporkan kasus diskriminasi ke media massa dan mengajukan gugatan hukum. Sebaliknya, GIKI-IEV lebih fokus pada kegiatan sosial dan jarang mengangkat isu diskriminasi secara terbuka.

Meskipun demikian, diskriminasi terhadap orang Indo-Eropa secara perlahan mulai berkurang. Namun, faktor internal dan eksternal, seperti pemikiran kolonial yang masih tertanam dalam diri sebagian orang Indo-Eropa, menghambat proses integrasi. Anggapan bahwa orang Indo-Eropa sombong dan masih setia pada Belanda semakin memperparah situasi.

Puncak ketegangan terjadi pada tahun 1957 saat konflik Irian Barat memanas. Orang Indo-Eropa, meskipun telah menjadi WNI dan mendukung kemerdekaan Indonesia, tetap dicurigai sebagai pendukung Belanda. Akibatnya, banyak orang Indo-Eropa mengalami diskriminasi dan pengusiran. Baru setelah pengusiran warga negara Belanda pada akhir tahun 1957, diskriminasi secara perlahan mulai mereda, dan

proses asimilasi dan integrasi mulai berjalan lebih lancar pada tahun 1960-an.

Riwayat Singkat *Indo-Eenheids Verbond* – GIKI-IEV

Organisasi IEV didirikan dengan nama *Indo-Europeesch Verbond* pada tahun 1919. Organisasi sosial ini melebar hingga juga menjadi pergerakan politik. IEV berkembang cepat menjadi organisasi orang Indo-Eropa terbesar dengan puluhan ribu anggota. Pada tahun 1920 sampai 1930-an organisasi ini terkenal konservatif dan membela kepentingan Indo-Eropa dan Belanda sehingga tercipta jarak besar antara pihak nasionalis dan pihak Indo-Eropa. Wacana kuat tentang pihak 'sana' dan 'sini' untuk sering digunakan dalam pers nasionalis. Baru pada akhir masa kolonial IEV mulai mendekati kubu nasionalis perlahan, antara lain dengan mendukung Petisi Soetardjo tahun 1936 untuk otonomi Hindia Belanda.

IEV bimbang selama masa penjajahan Jepang dan revolusi. Perang dan kekacauan yang terjadi menyebabkan bahwa banyak anggota keluar dan organisasi tidak berjalan secara efektif. Baru pada akhir masa revolusi IEV mampu untuk menarik kembali anggota, namun memiliki sikap yang gonta-ganti terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini menyebabkan bahwa banyak anggota IEV pun bingung dengan sikap yang sebenarnya. Ini paling menonjol pada waktu Konferensi Meja Bundar, ketika kedua pengurus inti De Vries dan ir. Wermuth ragu-ragu dan tidak jelas tentang pandangan mereka terhadap kewarganegaraan Indonesia dan kemerdekaannya (Daruch 1957). Walaupun demikian, IEV tetap menjadi organisasi terbesar orang Indo-Eropa waktu itu dengan klaim masih memiliki 8000 anggota (van der Veur 1960). IEV juga melawan sistem kewarganegaraan pasif, yang berarti bahwa semua orang Indo-Eropa secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dan mengusul sistem aktif, yang berarti bahwa orang Indo-Eropa sendiri dapat memilih kewarganegaraan mereka antara Indonesia dan Belanda.

Pada akhir tahun 1950 IEV hampir dibubarkan karena masalah-masalah internal (*Nieuwe Courant* 1950b). Sebuah konferensi besar diadakan di Surabaya yang menjadi landasan

untuk ke depannya. Nama *Indo-Europeesch Verbond* diubah menjadi *Indo-Eenheids Verbond* dengan nama bahasa Indonesia Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia (GIKI-IEV). Fokus GIKI-IEV adalah kepentingan masa depan Indonesia dan posisi orang Indo-Eropa berstatus WNI. Peraturan baru diberlakukan, antara lain bahwa hanya orang Indo-Eropa dengan status WNI boleh menjadi anggota. Diputuskan juga bahwa pekerjaan sosial dan pendidikan tetap menjadi prioritas. GIKI-IEV menegaskan bahwa perlu ada usaha untuk menjadi 'Warga Negara Asli', yang dapat dicapai melalui pendidikan (*Nieuwe Courant* 1950a). Namun, dengan catatan bahwa orang Indo-Eropa ada budaya tersendiri yang perlu dipertahankan dalam rangka nasional (*De Locomotief* 1950a). Semua hal berbau politik ditolak dan GIKI-IEV kembali lagi ke dasarnya waktu pendirian tahun 1919 sebagai organisasi sosial.

Banyak anggota keluar dan dalam kelompok Indo-Eropa sendiri tidak ada konsensus tentang jalan ke depan (*De Vrije Pers* 1953b). Alasannya antara lain bahwa banyak tokoh Indo-Eropa berangkat ke Belanda yang sebelumnya propaganda tentang mengambil kewarganegaraan Indonesia, kecewa bahwa bidang politik tidak ditekun lagi dan sekolah-sekolah GIKI-IEV menghadapi tantangan masyarakat, finansial dan kekurangan guru (*De Nieuwsgier* 1953). Ketua baru GIKI-IEV, Weiss, sangat dipuji sebagai penyelamat dari krisis-krisis ini yang pada akhirnya dapat diatasi. Jumlah anggota mulai bertambah lagi, dan menurut GIKI-IEV orang mulai sadar bahwa perjuangan sosial lebih baik dibandingkan perjuangan politik untuk mencapai asimilasi di Indonesia. Setelah konferensi tahun 1953 ini GIKI-IEV mengalami pertumbuhan baik, di jumlah cabang organisasi, anggota, dan sekolah.

Tahun-tahun berikut terutama ditandai konsolidasi dan perkembangan GIKI-IEV. Mulai tahun 1953 ada tegangan yang semakin besar antara GIKI-IEV dengan Partai Indo Nasional, partai politik orang Indo-Eropa. Ini bersama dengan faktor eksternal seperti ekonomi, diskriminasi dan tekanan sosial menghambat pertumbuhan besar bagi GIKI-IEV. Dalam kata GIKI-IEV sendiri keamanan dalam negeri, pemulihan ekonomi dan pendidikan menjadi tiga

persoalan utama bagi orang Indo-Eropa di Indonesia (*Algemeen Indisch Dagblad* 1955). Keamanan dalam negeri dalam hal ini adalah berbagai konflik seperti upaya kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik Maluku Selatan, dan Darul Islam yang disalahkan atas Belanda dan oleh karena itu secara langsung atau tidak langsung juga menjadi salahnya orang Indo-Eropa, baik yang berstatus WNI dan non WNI (van der Kroef 1954). Pers Belanda yang sangat negatif tentang Indonesia tidak membantu melancarkan asimilasi, karena untuk sebagian besar masyarakat Indonesia seluruh orang Indo-Eropa dikaitkan dengan Belanda.

Kegiatan sosial pada masa ini mulai berjalan semakin lancar. Di Semarang, terdapat komite perempuan yang mulai mengadakan berbagai proyek seperti mengadakan pasar kecil dengan menjual kerajinan tangan dan jajan benuansa Belanda dan Indo-Eropa untuk membantu orang miskin (*De Locomotief* 1953). Di samping itu, mereka mendapatkan pujian atas sekolah asosiasi yang dikembangkan. Sekolah ini merupakan sekolah dasar yang pada awalnya diajar menggunakan Bahasa Belanda dengan perspektif masa depan untuk lanjut pendidikan baik di Belanda maupun di Indonesia (*Algemeen Handelsblad* 1954). Pendidikan ini semakin diperluas dengan mendirikan berbagai sekolah lain, seperti SMP, SMK, dan sekolah guru. Pusat kegiatan dan anggota di Jawa Barat dan Tengah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung. Secara ideologi GIKI-IEV sangat dekat dengan nasionalisme dan menjunjung tinggi ajaran negara Pancasila. Lambang-lambang Pancasila sangat menonjol dalam bendera GIKI-IEV, seperti tampak pada Gambar 1.

Pemilihan umum tahun 1955 menjadi tonggak baru bagi GIKI-IEV. Organisasi yang awalnya berfokus pada kegiatan sosial ini mulai menunjukkan ambisi politik dengan mendorong anggotanya untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Gagalnya perwakilan orang Indo-Eropa terpilih dalam pemilu memicu konflik internal di dalam organisasi.

Mengacu pada konstitusi sementara yang menjamin keterwakilan minoritas, GIKI-IEV mengajukan daftar calon anggota DPR dan Konstituante kepada pemerintah. Namun, proses

penyusunan daftar ini memicu perpecahan internal. Beberapa anggota tidak setuju dengan cara daftar calon dibentuk, terutama karena ada nama-nama yang sengaja dihilangkan (*De Nieuwsgier*, 1956a). Munculnya daftar calon dari kubu yang berbeda semakin memperparah perpecahan. Masalah korupsi yang terjadi di dalam organisasi juga menghambat penyelesaian konflik ini (*Algemeen Indisch Dagblad*, 1956a).

Konflik internal ini berdampak signifikan terhadap GIKI-IEV. Banyak anggota memilih keluar dari organisasi, dan mereka yang bertahan semakin mendorong asimilasi secara total. Meskipun demikian, GIKI-IEV tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan, terbukti dengan diangkatnya tiga dari enam anggota yang diajukan dalam daftar calon. Namun, keputusan pemerintah untuk mengangkat Princen, yang bukan orang Indo-Eropa, memicu kekecewaan di kalangan anggota GIKI-IEV.



Gambar 1. Lambang bendera GIKI-IEV

Sumber: *Herdenkings-nummer 35 jarig bestaan Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia 1954.*

Pada tahun 1956-1959 GIKI-IEV mampu menempatkan diri sebagai organisasi utama orang Indo-Eropa nasionalis (*De Nieuwsgier* 1956b). Meskipun secara tegas GIKI-IEV mengatakan tidak berpolitik, mereka tidak sungkan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang keadaan politik dan juga membuat usul calon anggota pejabat pemerintah. IEV semakin meningkatkan program-program asimilasinya dengan pimpinan yang baru. Angkatan lama sebagian besar sudah mundur dari jabatan berpengaruh setelah konflik-konflik sekitar pemilihan umum. E. Utrecht dan E.F. Wens mewakili gerakan muda yang memiliki

pandangan lebih radikal terhadap konsep asimilasi. Kedua tokoh ini juga pejabat di PNI dan membawa visi budaya nasional kesatuan dari Soekarno. Mereka menolak sukuisme dan juga keberadaan suku Indo-Eropa. Proses Indonesianisasi dipercepat, tidak karena tekanan pemerintah seperti diklaim Remco Raben, melainkan karena ideologi nasionalisme kuat generasi pimpinan muda yang baru (Raben 2019).

Hasilnya bahwa nama IEV sudah jarang digunakan dan semakin sering disebut sebagai GIKI, nama berbahasa Indonesianya. Juga di sekolah-sekolahnya, GIKI menjadi nama organisasi yang mengurusnya serta bahasa yang digunakan dari kelas 1 sampai 6 adalah bahasa Indonesia, dengan bahasa Belanda fakultatif bagi siswa (*Java Bode* 1956). Sebelumnya itu sebaliknya dan perubahan ini menyebabkan konflik internal baru karena banyak anggota yang tidak setuju (Utrecht 1991). Pada kongres tahunan diputuskan juga bahwa bahasa Belanda digantikan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa rapat dan majalah, dukungan finansial dari pemerintah Belanda dihentikan, serta keperluan untuk mempercepat proses asimilasi dianggap sangat penting (*Algemeen Indisch Dagblad* 1957). Jumlah anggota waktu itu mencapai 5000 anggota, tetapi cepat menurun lagi tinggal 1300 karena kebijakan asimilasi baru. Ketua Utrecht karena kontroversial tidak lama setelahnya mundur dari jabatan dan diganti E.F. Wens sebagai ketua baru pada akhir tahun 1957 (Meijer 2004).

Hubungan dengan Soekarno sebagai pelindung informal semakin dekat. Pada tanggal 11 Maret 1956 dan 1957 diadakan kunjungan ke istana di Bogor dan Jakarta (Koot 1975). Para tokoh GIKI mengucapkan dukungan mereka kepada rencana-rencana Soekarno, termasuk Demokrasi Terpimpin. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada niat lagi untuk memegang identitas 'Indo' sendiri, melainkan sepenuhnya mengambil identitas Indonesia (Koot 1975). Pandangan ini sangat berbeda dengan GIKI tahun 1950-1956 yang ingin mencapai integrasi orang Indo-Eropa sebagai salah satu suku di Indonesia.

Namun setelah tahun 1958 GIKI-IEV sudah hampir eksklusif bergerak di bidang pendidikan, meskipun memiliki perwakilan relatif besar di kursi wakil golongan kecil. Wakil-wakil ini rata-rata tidak

berupa orang penting dalam pergerakan dan hanya diangkat karena afiliasi dengan partai dalam kabinet baru. Perkembangan internal dan nasional yang membawa gejolak-gejolak baru menyebabkan bahwa tidak lagi diadakan kunjungan ke Soekarno dan GIKI-IEV semakin mengurangi kegiatan. Berbagai konflik internal yang melibatkan tokoh penting menyebabkan bahwa GIKI-IEV semakin melemah. Sikap anti sukuisme menyebabkan banyak anggota yang cenderung anggap orang Indo-Eropa sebagai suku tersendiri keluar. Juga konflik-konflik ini menyebabkan bahwa tokoh penggerak motor GIKI-IEV keluar dan kemampuannya semakin berkurang dalam kegiatan sosial. GIKI-IEV menjadi yayasan pendidikan pada tahun 1961 yang masih bertahan sampai saat ini (Raben 2019).

Riwayat Singkat PIN

Partai Indo Nasional sangat identik dengan beberapa tokoh intinya, antara lain J.P. Snel Seorang tokoh kontroversial, apalagi di kalangan Indo-Eropa, dan pejuang kemerdekaan Indonesia melalui bidang politik. Pada masa mudanya Snel mendirikan dan menjabat sebagai ketua dua periode di cabang pemuda IEV di Belanda (Daruch 1957). Setelah Jerman diusir dari Belanda, dia kembali ke Indonesia dan mendirikan pelopor PIN, yaitu *Indisch Nederlands Genootschap* pada tahun 1944. Di Indonesia dia bergabung kembali dengan IEV, namun kecewa dengan sikap IEV terhadap Indonesia sehingga cepat keluar lagi. Pada tahun 1949 didirikan *Indo-Nationale Partij* setelah fusi dengan partai politik Indo-Eropa *De Blijver* yang dipimpin Ch. R. Le Cotey, yang garis keras pendukung kemerdekaan (Daruch 1957).

Pada waktu Konferensi Meja Bundar, Snel juga hadir sebagai salah satu wakil golongan Indo-Eropa, satu-satunya yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara total. Snel dengan tegas menolak kewarganegaraan dobel atau jenis serupa, mendorong Irian masuk wilayah Indonesia, dan menginginkan hak dan kewajiban yang sama bagi semua WNI (Daruch 1957). Dia juga mendesak bahwa harus ada sistem pasif untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia (van der Veur 1954). Partainya Snel waktu ini masih sangat kecil, kurang lebih 300 anggota dengan sekitar

sepertiga jumlah itu yang berada di Belanda (van der Veur 1960). Itu jauh berbeda dengan IEV yang ada klaim sebanyak 8000 anggota. Meskipun demikian, dikatakan bahwa Snel ada banyak simpatisan di kalangan pemuda Indo-Eropa. Tetapi mereka takut untuk bergabung karena kemungkinan besar akan dipecah atau dibalas dendam oleh pemerintah Belanda (Daruch 1957).

Legitimasi keberadaan PIN setelah 1949 didasarkan kepada keberadaan golongan kecil turunan asing secara hukum (Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1951). PIN menyatakan diri secara tegas memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajiban. Jaminan kursi perwakilan khusus maka juga ditolak oleh PIN, karena tidak ada kebutuhan seperti itu jika akhirnya sudah ada satu golongan WNI saja. PIN pada tahun 1949 memiliki program partai yang sangat nasionalis dan mendukung Republik Serikat Indonesia dalam pembangunan Indonesia, termasuk Irian. Hewett menyebut PIN sebagai penerus ideologi *Indische Partij*, namun ini tidak sepenuhnya benar (2016). Douwes Dekker dan Dahler sebelumnya pejuang keras asimilasi total dan keras melawan rasa superioritas orang Indo-Eropa pada umunnya. J.P. Snel dan PIN memandang asimilasi berbeda dan tidak campur tangan dalam masalah di luar politik, seperti mentalitas (Dahler 1946). Asimilasi yang dimaksud PIN adalah integrasi secara hukum dan penghapusan semua pasal yang mengandung unsur diskriminasi antar warga negara. Maka karena itu PIN juga menolak dwi-kewarganegaraan dalam konteks apapun. Ketika tujuan itu tercapai maka PIN akan membubarkan diri, karena tidak ada legitimasi lain untuk keberadaannya (Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1951). Lebih tepat untuk menganggap PIN sebagai penerus organisasi Indonesia Merdeka pada masa revolusi. Kedua tokoh utama, yaitu Agus Daruch dan Dick Hage, bergabung PIN dan terutama Hage memegang jabatan penting. Konsep integrasi PIN dan IM sehingga juga sangat mirip, lebih mirip daripada *Indische Partij*.

Setelah KMB selesai, dunia politik orang Indo-Eropa mengalami banyak guncangan. Banyak partai kecil didirikan, saling bertengkar dan kemudian melakukan fusi atau dibubarkan. Masalah utama adalah wacana asimilasi. Ada yang

mendorong bahwa orang Indo-Eropa dan orang Indonesia harus menjadi sama persis, sedangkan Snel berpendapat bahwa ada perbedaan antara keduanya. Yang menghambat integrasi dalam masyarakat adalah perbedaan agama dan posisi orang Indo-Eropa di masa lalu (*De Vrije Pers* 1950). Snel dan beberapa tokoh besar seperti Claessen, keduanya anggota parlemen, sempat keluar PIN karena masalah menggunakan istilah asimilasi (*De Locomotief* 1950b). Snel melihat bahwa tidak perlu menggunakan istilah tersebut karena memang terdapat perbedaan antara orang Indo-Eropa dan Indonesia asli, yang penting integrasi lancar. Le Cotey berpendapat bahwa asimilasi harus terjadi dan dipercepat. Waktu awal itu posisi Snel menjadi sangat kontroversial karena masalah ini, sehingga hanya beberapa orang ingin bekerja sama dengannya (*De Nieuwsgier* 1951).

Masalah di dalam PIN berlanjut selama tahun 1951. Berbagai cabang keluar, namun pada tahun 1952 terjadi awal regenerasi PIN. Snel ditetapkan kembali sebagai ketua PIN (*De Vrije Pers* 1952). Nama partai diubah menjadi Persatuan Indonesia Nasional dan keanggotaan dibuka khusus bagi yang berstatus WNI. PIN lanjut menekan hak yang sama bagi orang Indonesia tanpa memandang faktor keturunan. Ini dilawan oleh antara lain GIKI-IEV yang menolak keberadaan partai politik orang Indo-Eropa karena menghambat integrasi (*Indische Courant voor Nederland* 1952). Tahun 1953 terjadi fusi lagi dengan beberapa cabang yang sempat keluar dari PIN sebelumnya dan posisinya sebagai partai politik tunggal milik orang Indo-Eropa semakin kokoh (*De Vrije Pers* 1953a). PIN mulai menerbitkan surat kabar partai bernama PINcet pada tahun berikutnya ketika partai sudah semakin stabil dengan pusat di kota Surabaya. Pada waktu ini salah satu poin utama menjadi permasalahan hak milik tanah. Peraturan pada zaman Hindia Belanda masih berlaku pada masa itu, yang menyatakan bahwa orang luar dan turunan asing tidak boleh memiliki tanah. PIN adalah salah satu gerakan yang memperjuangkan ini dan didukung terutama oleh orang Indo-Eropa di pedalaman, seperti dapat dilihat dari rincian hasil pemilihan umum.

Ketika pada tahun 1954 diumumkan bahwa ada pemilihan umum, PIN bimbang mengenai

keikutsertaan. Pada awalnya dinyatakan akan ikut di pemilihan umum Jawa Timur dan Jawa Tengah. J.P. Snel dan PIN masing-masing ikut sebagai calon terpisah. Tidak lama setelah itu pada tahun 1954 PIN menyatakan tidak ingin ikut karena sudah ada terlalu banyak partai dengan ideologi yang sama tetapi tanpa kerja sama (*Het nieuwsblad voor Sumatra* 1954). Secara politik PIN tetap aktif membahas permasalahan ekonomi, kewarganegaraan, dan ikut menekan Belanda untuk mengembalikan Irian. Pada tahun 1955 PIN memutuskan untuk jadi ikut dalam pemilihan umum Jawa Timur, untuk parlemen dan konstituante (*Het nieuwsblad voor Sumatra* 1955a). Kemungkinan ini berhubungan dengan sikap PIN yang ragu-ragu dan Snel yang sebelum pemilihan umum mengikuti fraksi Partai Rakyat Nasional di parlemen. Pada akhirnya Snel, meskipun sudah mendaftar pada tahun 1954, tidak ikut sebagai individu dalam pemilu. Dia menjadi nomor urut pertama di daftar calon PIN untuk wilayah Jawa Timur. Daerah lain tidak ada daftar calon PIN, soalnya pusat pergerakan ini memang terbatas kepada Jawa Timur saja.

Waktu pemilihan umum PIN tidak mendapatkan cukup suara untuk masuk parlemen. Hasil akhir adalah 5681 suara di wilayah Jawa Timur (Panitia Pemilihan Indonesia 1955). Berhubungan status PIN sebagai partai nasional dan bukan sebagai partai golongan kecil, maka tidak diketahui berapa banyak orang Indo-Eropa dan Indonesia etnis lain memilihnya (*De Nieuwsgier* 1956b). Namun karena program partai ini sepenuhnya memperjuangkan penghapusan hukum golongan kecil, maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua pemilih memang berasal dari kalangan orang keturunan Eropa.

Usai pemilihan umum PIN kecewa dengan pemerintah karena tidak memperbolehkan minoritas Eropa memilih wakilnya sendiri untuk parlemen dan konstituante. Itu karena secara konstitusional ditetapkan bahwa ada kuota 6 kursi untuk orang Indo-Eropa di parlemen dan 12 kursi di konstituante, yang ditetapkan oleh presiden langsung apabila belum terpenuhi pada masa pemilihan, ketika memang tidak ada satupun yang terpilih. Itu sesuai rencana, karena partai politik besar sengaja menempatkan orang Indo-Eropa di

bawah daftar calon, agar dapat merebut kursi wakil golongan kecil setelah pemilihan umum.

Baru setelah hampir setengah tahun lewat para wakil minoritas untuk parlemen diangkat oleh presiden setelah PIN berkali-kali kirim surat dan melakukan protes (*Algemeen Indisch Dagblad* 1956b). Mereka pun tidak dianggap representatif. Salah satunya adalah orang Belanda totok, J.C. Princen, dan dua orang lain sekaligus adalah wakil golongan Islam, sedangkan hanya sekitar 5% dari orang Indo-Eropa beragama Islam (*Algemeen Indisch Dagblad* 1956c). Tokoh terbesar dari gerakan GIKI-IEV dan PIN seperti Mayor Polak dan Snel tidak dipilih. Pemerintah juga mengatakan bahwa tidak melihat dukungan minoritas sendiri, tetapi dukungan partai penting, hingga antara lain terpilih dua wakil dari golongan Islam (*De Nieuwsgier* 1956c). Hal itu juga mengecewakan PIN, karena Snel merasa bahwa dia sudah membuktikan dia cukup representatif bagi golongan Indo-Eropa dengan hasil pemilu.

Seperti disebut sebelumnya, pada waktu ini juga kedua pemimpin organisasi Indonesia Merdeka bergabung di PIN. Hage, waktu itu wakil ketua PIN, juga diangkat sebagai wakil untuk DPR. Pemikiran kedua organisasi ini cukup mirip, terutama pandangan asimilasi dan integrasi. PIN dan Indonesia Merdeka memandang bahwa integrasi yang dibutuhkan dan asimilasi secara hukum saja. Orang Indo-Eropa berupa suatu suku, sama seperti orang Batak, dengan identitas dan agama yang tidak harus sesuai mayoritas (*De Nieuwsgier* 1956c). Yang diperlukan itu adaptasi, agar dapat membangun Indonesia tanpa feodalisme dan kolonialisme.

Soal perwakilan di DPR, pandangan umum tetap bahwa orang seperti Snel dan Mayor Polak lebih cocok untuk diangkat sebagai wakil dibandingkan wakil yang dilantik. Snel juga menegaskan pandangannya bahwa salah untuk bilang bahwa minoritas harus menyatu di mayoritas, yang perlu dilakukan adalah adaptasi di Indonesia yang baru. Dengan bodoh menghilang di mayoritas justru perlu dilawan, karena suku dan agama lain seperti orang Batak dan orang Kristen juga ada tempat di masyarakat Indonesia, seperti juga orang Indo-Eropa (*De Nieuwsgier* 1956c). Dari ucapan Snel dan dukungan tokoh bekas IM dapat terlihat bahwa asimilasi yang mereka

propagandakan bukanlah asimilasi total, tetapi menganggap adanya kelompok kesatuan budaya di dalam tubuh bangsa Indonesia. Indo-Eropa setara dengan orang Batak sebagai suku dalam negara kesatuan Indonesia.

Pandangan asimilasi tersebut dan perjuangan politik tidak lagi populer pada tahun 1956 dan setelahnya di kalangan Indo-Eropa. Pemuda Indo-Eropa nasionalis tidak bergabung di PIN. Mereka ikut dalam GIKI-IEV dan membawa pemikiran baru dalam organisasi sosial itu. PIN tidak mengalami perkembangan yang sama. Tidak terdapat regenerasi dalam partai ini dan tokoh-tokoh yang sama terus aktif menjabat posisi penting dalam partai.

Pada tahun 1957 PIN lanjut kecewa dengan sikap pemerintah karena 12 anggota konstituante wakil minoritas Eropa belum ditetapkan setelah hampir setahun (*Het nieuwsblad voor Sumatra* 1957). Perjuangan PIN mencapai tujuan secara tiba-tiba ketika presiden Soekarno mengumumkan Demokrasi Terpimpin dan penetapan ulang UUD 1945 pada tahun 1959. Dalam UUD 1945 tidak terdapat perbedaan hak warga atau golongan, sesuai keinginan PIN. Tidak diketahui bagaimana sikap PIN terhadap Soekarno dan sistem Demokrasi Terpimpin, meskipun PIN jelas berupa partai nasionalis yang mendorong anggotanya bergabung di PNI. PIN sekitar waktu ini dibubarkan, antara lain karena tujuannya sudah dicapai dan tidak ada legitimasi keberadaan partai ini lagi.

Perbedaan Konsep Asimilasi

Organisasi PIN dan GIKI-IEV masing-masing memilih jalan yang berbeda untuk mencapai integrasi dan asimilasi yang mereka menginginkan. PIN bergerak dalam dunia politik untuk menghapus diskriminasi hukum dan status sebagai golongan terpisah di jangka pendek, sedangkan GIKI-IEV melihat pendidikan dan kegiatan sosial sebagai cara asimilasi yang perlahan, alami, dan harmonis untuk jangka panjang. Keduanya menekan pentingnya berstatus WNI, namun khususnya PIN menegaskan bahwa unsur budaya orang Indo-Eropa tetap boleh dipertahankan. Unsur yang dimaksud terutama meliputi agama, bahasa, dan cara berpikir yang bergaya Barat.

Terdapat konsensus bahwa asimilasi total dengan cepat bukanlah apa yang ingin dicapai (van der Veur 1960).

GIKI-IEV pada awalnya memiliki sikap yang sama, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan asimilasi orang Indo-Eropa, mereka semakin menekan identitas budaya nasional Indonesia tanpa identitas budaya Indo-Eropa. Ada orang Indonesia pada waktu itu melihat bahasa Belanda sebagai bahasa terlarang dan agama non Islam sebagai agama penjajah (*Het nieuwsblad voor Sumatra* 1951). GIKI-IEV menolak hal tersebut, tetapi tetap menekan bahwa perlu ada asimilasi perlahan. PIN memiliki sikap yang berbeda setelah konsolidasi pada tahun 1953. Asimilasi secara budaya tidak dibutuhkan, karena orang Indo-Eropa membentuk suku tersendiri. Hanya asimilasi hukum antara minoritas dan mayoritas yang diperlukan.

Pada awalnya kedua organisasi menggunakannya dalam organisasi dan sekolah, tetapi pada tahun 1956 PIN mendorong GIKI-IEV untuk menggunakan Bahasa Indonesia di sekolah khususnya. Pada tahun 1957 GIKI-IEV resmi menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama organisasi, malah, dan di sekolah. Bahasa Belanda masih dipertahankan, tetapi di lingkungan pribadi dan sebagai mata pelajaran fakultatif di sekolah. Dapat dilihat bahwa asimilasi dipercepat setelah tahun 1956 dengan berbagai kebijakan baru. Itu disebabkan oleh angkatan muda yang mengambil alih pimpinan GIKI-IEV setelah 1956. Mereka membawa pemikiran nasionalis keras dan mendukung pemikiran Soekarno yang menolak sukuisme dan mencapai negara yang homogen. Ini adalah perubahan drastis dibandingkan dengan GIKI-IEV sebelum 1956, yang mementingkan proses perlahan dengan fokus yang terbagi untuk Indonesia dan Belanda. Fokus kepada Belanda sepenuhnya dibuang setelah tahun 1956.

PIN dan Snel selalu konsisten menekan hak dan kewajiban setara secara hukum bagi orang Indo-Eropa berstatus WNI. Tujuan utama dan alasan PIN berada adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini (Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1951). Status minoritas dilawan keras dan mulai tahun 1952 mereka hanya menerima WNI sebagai anggota. PIN mendorong adanya hukum anti diskriminasi

dan pencabutan biro khusus untuk minoritas (*Indische Courant voor Nederland* 1952). Mereka berusaha untuk mencapai hasil nyata dengan antara lain mengirim konsep Undang-Undang tentang kewarganegaraan bagi golongan turunan Eropa, tetapi pada umumnya upaya-upaya mereka jarang ditanggapi oleh pemerintah. Pada umumnya pemerintah sedikit campur tangan dalam integrasi dan asimilasi orang Indo-Eropa hingga awal Orde Baru. Sosok Soekarno paling dekat dengan gerakan nasionalis Indo-Eropa dan mendukungnya dengan memberikan panggung di istana-istananya dari waktu ke waktu. Akan tetapi ucapan dan tindakan yang menolak pengaruh asing secara tidak sengaja juga menimbulkan kesulitan dalam integrasi, karena orang Indo-Eropa ikut dilihat sebagai unsur asing oleh sebagian masyarakat.

GIKI-IEV dipandang sebagai organisasi orang Indo-Eropa utama yang mendapatkan cukup banyak perhatian dari Soekarno. Hal ini juga berdampak secara negatif ke PIN, karena terdapat tegangan antara kedua organisasi. Sebagai pergerakan politik PIN terlalu kecil untuk membawa suara yang berarti dan pemerintah lebih memilih bekerja sama dengan GIKI-IEV, antara lain karena basis keanggotaan lebih besar dan jasanya di bidang pendidikan. Selain itu, dunia politik orang Indo-Eropa terlalu kecil, kontroversial, dan instabil untuk menyatukan semua demi asimilasi hukum. Snel mencerminkan ini sebagai sosok yang kontroversial yang tidak mungkin membawa kesatuan melalui perjuangan politik.

GIKI-IEV lebih berhasil dalam perjuangan asimilasi melalui bidang sosial dan pendidikan. Sebagai gerakan sosial-budaya posisi mereka tidak serentan dan sekontroversial PIN, juga karena kurang bergantung kepada politik nasional. Awalnya GIKI-IEV menyerukan bahwa asimilasi perlu waktu yang cukup lama, sesuatu yang diterima baik oleh orang Indo-Eropa WNI yang tidak ingin memutuskan dengan latar belakang Belanda mereka. Cara utama untuk mencapai asimilasi ini adalah melalui sekolah-sekolah dasar. Pada awal ini terbuka khusus bagi anggota GIKI-IEV, namun seiring berjalan waktu dibuka untuk umum. Mereka di sini bekerja bersama departemen pendidikan yang dengan senang hati

mendukung upaya ini untuk menghadapi kekurangan sekolah di Indonesia. Jumlah 'sekolah peralihan' dengan cepat naik dari 2 sekolah pada tahun 1950 hingga 14 sekolah pada tahun 1953 (*De Vrije Pers* 1953b). Selain 'sekolah peralihan' ini di tingkat pendidikan dasar, ada juga beberapa SMP dan sekolah vokasi yang dikelola seperti dapat dilihat pada Tabel 1. Sekolah-sekolah ini dikelola oleh yayasan GIKI di bawah pimpinan GIKI-IEV.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Sekolah GIKI

Tahun	SD	SMP	Sekolah Vokasi
1950	2 (tidak jelas jenis apa)		
1952	6	1	2
1955	9	3	3

Sumber: *Java Bode* 1952; *De Nieuwsgier* 1953, *Het nieuwsblad voor Sumatra* 1955b.

Berdasar Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari awal fokus utama GIKI-IEV sebenarnya terletak di bidang pendidikan dan jumlah sekolah terus meningkat setelah tahun 1956. GIKI-IEV juga sadar tentang hal ini dan terus berusaha menambah jumlah sekolah, meskipun mengalami kesulitan dalam memperoleh guru dan gedung (*Java Bode* 1952). Sebagian besar guru adalah perempuan Indo-Eropa dan Maluku (Utrecht 1991). Terutama di Bandung dan Surabaya terjadi peningkatan jumlah sekolah yang besar. GIKI-IEV menegaskan bahwa pendidikan mereka disesuaikan dengan program pendidikan nasional dan pada awalnya menggunakan bahasa Belanda untuk kelas 1 sampai 6. Akhir tahun 1952 kebijakan itu diubah sehingga bahasa Belanda digunakan untuk kelas 1-3, sedangkan kelas 4-6 menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pada tahun 1957 bahasa Belanda dihapus dan diganti oleh bahasa Indonesia. Bahasa Belanda tetap ada, namun hanya sebagai mata pelajaran fakultatif. Sekolah ini memperhatikan kebutuhan negara dan merupakan asimilasi nyata yang dengan mendidik pemuda-pemudi Indo-Eropa menjadi warga negara yang baik menurut GIKI-IEV. Awalnya ini masih memiliki perspektif untuk lanjut pendidikan baik di Belanda atau Indonesia, tetapi pada tahun 1957 sudah secara keseluruhan fokus terhadap perspektif masa depan di Indonesia.

Pengasuhan pemuda yang terarah kepada membangun suatu negara Indonesia yang maju dilihat sebagai jalan utama. GIKI-IEV menganggap logis bahwa unsur budaya yang dicap Belanda semakin hilang, karena mereka memilih untuk hidup di Indonesia sebagai warga negara dan ingin fokus terhadap pembangunan Indonesia (*Algemeen Indisch Dagblad* 1955). Bahasa Belanda yang pada awal digunakan di sekolah peralihan GIKI-IEV sering dipermasalahkan masyarakat, walaupun dilindungi dan diizinkan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Indonesia yang bukan keturunan Eropa bersekolah di sekolah milik GIKI-IEV. Dampak positif sekolah-sekolah ini sangat besar, karena menjadi kontribusi nyata yang positif di mata pemerintah dan masyarakat. Selain orang Indo-Eropa dididik dengan perspektif Indonesia, kehadiran sekolah-sekolah ini juga sangat dihargai dan melancarkan proses asimilasi orang Indo-Eropa dalam masyarakat.

Setelah tahun 1954 regenerasi mulai semakin berjalan dan terjadi evaluasi ulang program kegiatan. Kegiatan malam kontak (*contact avonden*) yang diadakan sejak 1950 sebagai tempat bertemu antara orang Indo-Eropa dan orang dari luar GIKI-IEV yang dari awal didukung oleh Soekarno mulai berkurang karena tidak lagi ramai dikunjungi (*De Vrije Pers* 1954). Organisasi dan kegiatan oleh perempuan mulai berjalan lagi secara bertahap. Konsep kewarganegaraan ganda juga keras ditolak olehnya (*Algemeen Indisch Dagblad* 1955). Program lain yang terkenal dari GIKI-IEV seperti bantuan orang miskin tetap terlaksana namun secara terbatas karena dana tidak memadai (*Herdenkingsnummer 35 jarig bestaan Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia* 1954). Cabang pemuda GIKI-IEV setelah perang dunia sempat didirikan kembali sementara namun dengan secepat itu tenggelam lagi, sedangkan cabang pramuka hanya karena bertahan di beberapa cabang (*Herdenkingsnummer 35 jarig bestaan Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia* 1954). Meskipun menurut GIKI-IEV itu sendiri yang menjadi sasaran utama program-programnya berkaitan asimilasi adalah pemuda, fokus ini telah berpindah ke sektor pendidikan dengan jelas.

Proses asimilasi dan integrasi GIKI-IEV sangat dicerminkan dalam organisasi ini. Perlahan bahasa Indonesia menggantikan bahasa Belanda. Pada tahun 1955 90% dari semua orang Indo-Eropa yang berstatus warga negara tetap menggunakan bahasa Belanda di rumah (*Java Bode* 1955b). Namun dalam interaksi masyarakat, bahasa Indonesia sudah secara umum digunakan. Ajaran negara seperti Pancasila menduduki tempat yang penting dalam pembahasan sekolah dan organisasi (*Herdenkings-nummer 35 jarig bestaan Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia* 1954). Yang dianggap sebagai budaya Indo-Eropa tetap dilestarikan dan dipertahankan (van der Kroef 1960). Hari raya seperti pesta Sinterklaas tetap dirayakan di organisasi dan di sekolah-sekolahnya. Juga solidaritas antar anggota sangat tinggi, apalagi bagi mereka yang miskin. Mengenai agama, pakaian, dan nama GIKI-IEV memiliki sikap netral. Itu tidak wajib disesuaikan dengan mayoritas. Pimpinan angkatan muda yang cenderung radikal sudah tidak lagi mendukung gagasan lama seperti ini yang berasal dari masa revolusi. Yang penting bahwa generasi berikut siap untuk membantu pembangunan Indonesia dan memiliki identitas Indonesia nasional yang kuat.

Konflik Identitas Indo dan Indonesia

Meskipun GIKI-IEV dan PIN memilih bidang berbeda untuk mengejar asimilasi yang ingin dicapai, mereka sering bertengkar dan saling menyerang dalam media massa tentang hambatan atau kesalahan di jalan menuju asimilasi. Sudah pada tahun 1952 ketua GIKI-IEV menolak keberadaan PIN, antara lain karena berdasar politik (*Indische Courant voor Nederland* 1952). Kritik terutama dari sisi GIKI-IEV dilanjutkan setelah itu, namun PIN dan khususnya Snel terus bertahan di tengah berbagai krisis internal dalam PIN yang terjadi pada waktu yang sama. PIN disebut bodoh dan hanya mampu untuk teriak ‘menghapuskan minoriteit’ (*De Vrije Pers* 1953b). Snel menanggapi ini dengan menyatakan bahwa GIKI-IEV sebagai organisasi sosial justru membawa orang Indo-Eropa ke isolasi sosial, meskipun dia mengakui bahwa ada juga hasil baik melalui sekolahnya (*De Nieuwsgier* 1954a). Konflik ini, yang sudah bertahun-tahun ada, dengan cepat

meledak. Yang diawali sebagai berbeda pendapat tentang cara integrasi dan berintegrasi, berkembang menjadi permasalahan pribadi. Terutama Mayor Polak dari GIKI-IEV dan Snel dari PIN menjadi sasaran ejekan. Desember 1954 kedua pihak melakukan semacam konsiliasi dan menyatakan ‘kedamaian’ antara PIN dan GIKI-IEV. Mereka menyatakan bahwa mereka memiliki bidang yang berbeda dan tidak perlu ada saling campur tangan dan penghambatan (*De Nieuwsgier* 1954b).

Guncangan senjata ini tidak bertahan lama karena keterlibatan Snel dan C. van Caspel, ketua dan wakil ketua PIN, dalam kasus Jungschläger-Schmidt pada tahun 1955. Ketika pengacara Schmidt, Bouman, sedang diselidiki berkaitan tuduhan korupsi saksi, mereka pergi ke jaksa tinggi dengan informasi yang penting dan membantu pengacara Bouman. Namun, tidak lama setelahnya, mereka berubah pendapat dan menyatakan dirinya tertipu untuk memberi pernyataan yang membantu Bouman. GIKI-IEV, khususnya Mayor Polak, sangat skeptis dan minta bukti serta mulai kembali menyerang PIN. Jika tidak ada bukti, maka Mayor Polak membuat aduan di pengadilan. Argumentasi Mayor Polak bahwa sikap dan pernyataan Snel tidak hanya merugikan bagi negara dan orang Indo-Eropa, melainkan bahkan mencemari nama baiknya (*De Nieuwsgier* 1955a). Snel tidak membawa bukti, sehingga Mayor Polak mengajukan aduan, yang dibalas dengan aduan oleh Snel terhadap Mayor Polak (*De Nieuwsgier* 1955b). Kembalinya konflik ini yang berujung lagi ke adu mulut menyebabkan bahwa banyak tokoh kecewa dengan sikap GIKI-IEV dan PIN. Keseriusan mereka dalam menangani asimilasi diragukan dan menyebabkan konflik internal terutama di GIKI-IEV sehingga berbagai anggota keluar.

Tahun-tahun berikut tidak lagi ditandai konflik besar dan kedua organisasi lanjut berjalan sesuai cara masing-masing. Sebuah kedamaian rapuh tercapai lagi, di tengah situasi yang memanas berkaitan dengan isu penjajahan Papua oleh Belanda yang semakin ditekan. Di samping itu, pengaruh PIN mulai semakin menghilang setelah pemilihan umum yang sudah sedikit pada awalnya. Meskipun DPR dan konstituante masing-masing ada 1 wakil PIN, itu tidak cukup karena ketuanya

tidak terlibat langsung. Pada waktu ini berbagai tokoh penting keluar PIN sehingga kekuatan semakin berkurang (*Java Bode* 1957). GIKI-IEV terus bertahan meskipun diganggu masalah internal yang baru setelah dilakukan reorganisasi (*Algemeen Indisch Dagblad* 1957). Tokoh lama yang provokator seperti Mayor Polak tidak dominan lagi dan diganti tokoh muda lain di GIKI-IEV. Keberhasilan yang diperoleh dalam bidang pendidikan semakin diteruskan dan pada akhirnya menjadi fokus utama dari GIKI-IEV. Dukungan dari pemerintah Belanda ditolak setelahnya dan asimilasi semakin dipercepat melalui sekolah-sekolahnya (*De Waarheid* 1957). Akan tetapi, masalah internal baru muncul dengan ketua-ketua baru yang kontroversial seperti Utrecht dan Wens. Kebijakan keras mereka tanpa mendengarkan keinginan anggota menyebabkan bahwa GIKI-IEV cepat runtuh dalam kurun waktu beberapa tahun.

Identitas dan sejarah orang Indo-Eropa menjadi hal penting dalam perjuangan untuk integrasi dan asimilasi. Istilah-istilah lama dalam wacana yang dikaitkan dengan orang Indo-Eropa seperti *levensstrijd* atau 'perjuangan untuk hidup' terus digunakan (*De Vrije Pers* 1953b). Juga buku yang diterbitkan pada tahun 1954 untuk merayakan berdirinya 35 tahun GIKI-IEV sangat jelas mencerminkan identitas Indo dan Indonesia yang bersatu. Sepanjang seratus halaman lebih diuraikan tentang masa lalu GIKI-IEV dan perjuangan orang Indo-Eropa selama 35 tahun. Ini bergantian dengan topik tentang jasa dan perjuangan GIKI-IEV saat ini dan mendapatkan prakata dari Soekarno bersama beberapa menteri dan wali kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Buku ini dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia dan ditutup dengan lagu organisasi GIKI-IEV, yang membungkus semua pembahasan tentang orang Indo-Eropa dan bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan (*Herdenkingsnummer 35 jarig bestaan Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia* 1954).

Simpulan

GIKI-IEV dan PIN, dua organisasi yang mewakili kepentingan orang Indo-Eropa, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan asimilasi. GIKI-IEV, sebagai organisasi

sosial, awalnya fokus pada pendidikan, sementara PIN sebagai partai politik lebih aktif dalam politik praktis. Namun, perbedaan pendekatan ini seringkali memicu konflik internal dan eksternal.

Perdebatan mengenai cara terbaik untuk mencapai asimilasi menjadi isu sentral. Pandangan mengenai orang Indo-Eropa sebagai kelompok etnis yang berbeda secara bertahap berubah seiring dengan perkembangan nasionalisme Indonesia. Konsep budaya nasional yang digagas oleh Soekarno semakin memperkuat gagasan tentang kesatuan bangsa. Namun, konflik internal di dalam kedua organisasi, ditambah dengan diskriminasi yang dialami oleh orang Indo-Eropa, menghambat proses asimilasi.

Puncak ketegangan terjadi pada masa Demokrasi Liberal. Konflik Irian Barat dan sentimen anti-Belanda semakin memperparah situasi. Orang Indo-Eropa, meski telah menyatakan kesetiaan pada negara, tetap menjadi sasaran diskriminasi. Dengan penerapan Demokrasi Terpimpin, upaya PIN untuk memperjuangkan hak-hak orang Indo-Eropa melalui jalur politik mengalami kemunduran. GIKI-IEV, yang awalnya lebih fokus pada pendidikan, semakin menguatkan posisinya.

Seiring perjalanan waktu, identitas Indo-Eropa semakin memudar. Generasi muda semakin mengadopsi budaya Indonesia dan meninggalkan identitas kolonial mereka. Proses asimilasi semakin dipercepat setelah penyelesaian masalah Irian Barat dan dengan semakin terintegrasinya orang Indo-Eropa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Referensi

- Aeckerlin, Tjaal dan Rick Schoonenberg. 2005. *Neffers Kambek. Indische Nederlanders in roerige tijden*. Amsterdam: KIT Publishers.
- Algemeen Handelsblad*. 1 Mei 1954;
- Algemeen Indisch Dagblad*. 12 Juni 1957.
- Algemeen Indisch Dagblad*. 22 Mei 1956.
- Algemeen Indisch Dagblad*. 11 September 1956b.
- Algemeen Indisch Dagblad*. 13 Februari 1956a.
- Algemeen Indisch Dagblad*. 16 Oktober 1957.
- Algemeen Indisch Dagblad*. 23 Februari 1954.
- Algemeen Indisch Dagblad*. 5 November 1956c.
- Algemeen Indisch Dagblad*. 9 Mei 1955.

- Bosma, Ulbe, dan Remco Raben. 2003. *De oude Indische wereld. De Geschiedenis van Indische Nederlanders 1500-1920*. Amsterdam: Bert Bakker.
- Dahler, P. F. 1946. *De Indo in de Huidige Maatschappij in Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Daruch, A. 1957. *De nationalistische beweging onder de Indo-Europeanen*. Ministerie van Voorlichting RI.
- De Locomotief*. 13 Maret 1950a.
- De Locomotief*. 25 Juli 1950b.
- De Locomotief*. 9 November 1953.
- De Nieuwsgier*. 1 Februari 1951.
- De Nieuwsgier*. 10 Desember 1956c.
- De Nieuwsgier*. 12 November 1954a.
- De Nieuwsgier*. 15 Desember 1954b.
- De Nieuwsgier*. 16 Maret 1955a.
- De Nieuwsgier*. 24 Maret 1955b.
- De Nieuwsgier*. 25 Januari 1956a.
- De Nieuwsgier*. 28 Mei 1953.
- De Nieuwsgier*. 6 Desember 1956b.
- De Vrije Pers*. 15 Juli 1950.
- De Vrije Pers*. 18 Mei 1953b.
- De Vrije Pers*. 29 April 1953a.
- De Vrije Pers*. 3 Maret 1952.
- De Vrije Pers*. 5 Agustus 1954.
- De Waarheid*. 18 Juni 1957.
- Feith, Herbert dan Lance Castles. 1970. *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press.
- Goran, A. J. 1957. The Trial of Schmidt in Indonesia. *The Australian Quarterly* 29(3): 53-60.
- Het nieuwsblad voor Sumatra*. 19 Juli 1951.
- Het nieuwsblad voor Sumatra*. 7 Mei 1955b.
- Het nieuwsblad voor Sumatra*. 7 Juli 1954.
- Het nieuwsblad voor Sumatra*. 8 November 1957.
- Het nieuwsblad voor Sumatra*. 8 September 1955a.
- Hewett, R. L. 2016. *Indo (Eurasian) communities in postcolonial Indonesia*. The Australian National University.
- Indisch Herinneringscentrum. *De Atlas van de Oversteek: naoorlogse migratie vanuit Indonesië naar Nederland*. Zutphen: Walburg Pers.
- Indische Courant voor Nederland*. 12 Maret 1952.
- Jacobsen, L. R. 2018. "The "Eurasian Question": Solved by Migration?" *Transfers*, 8(3): 74-99.
- Java Bode*. 11 September 1956.
- Java Bode*. 13 Februari 1957.
- Java Bode*. 28 Februari 1955a.
- Java Bode*. 6 Oktober 1955b.
- Java Bode*. 8 April 1952.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1951. *Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Koot, J. R. 15 April 1975. In het Heden. *Tong-Tong*, 6-7.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Meijer, Hans. 2004. In Indië Geworteld. *De Twintigste Eeuw*. Amsterdam: Bert Bakker.
- Nieuwe Courant*. 10 Maret 1950a.
- Nieuwe Courant*. 4 Desember 1950b.
- Panitia Pemilihan Indonesia. 1955. *Daftar angka-angka hasil pemilihan umum DPR, th. 1955*. Jakarta: Panitia Pemilihan Indonesia.
- Protschky, Susie. 2011. Race, class, and gender: Debates over the character of social hierarchies in the Netherlands Indies, circa 1600-1942. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde* 167(4): 543-556.
- Raben, Remco. 1 Juli 2019. Het Verbond. *Moesson*, 41-44.
- Rooyackers, Max. 2022. Makna Islam bagi orang Indo-Eropa nasionalis pada awal masa kemerdekaan Indonesia. *Bandar Maulana*, 27(1): 1-11.
- Rooyackers, Max. 2023. Membangun jembatan antara 'sana' dan 'sini': Pergerakan Indo-Eropa nasionalis 1923-1942. Dalam *Refleksi historiografi Indonesia: Kumpulan Essay Ilmiah tentang Sejarah Lokal dan Sosial*, disunting Muhamad Azhari Ramadan, 28-54. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Touwen-Bouwsma, Elly. Indo comité's op Java 1943-1945. Dalam *Het Einde van Indië*, disunting Wim Willems dan Jaap de Mor, 175-172. 's-Gravenhage: SDU Uitgeverij.
- Utrecht, Elien. 1991. *Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid*. Amsterdam: Sua.

- van der Kroef, J. M. 1953. The Eurasian Minority in Indonesia. *American Sociological Review*, 18(5): 484–493.
- van der Kroef, J. M. 1954. The Dutch Position in Indonesia Today. *Far Eastern Survey*, 23(6): 88–94.
- van der Kroef, J. M. 1958. The Trials of Indonesian Democracy. *The Review of Politics* 20(1): 70-90.
- van der Kroef, J. M. 1960. The Indonesian Eurasian and his culture. *Phylon*, 16(4): 448–462.
- van der Veur, P. W. 1954. The Eurasians of Indonesia: castaways of colonialism. *Pacific Affairs*, 27(2): 124–137.
- van der Veur, P. W. 1960. Eurasian dilemma in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 20(1): 45–60.
- Herdenkings-nummer 35 jarig bestaan Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia*. 1953. Stadium.